



Website: <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk>



Terakreditasi S4 – SK No. 36/E/KPT/2019

Penerbit: Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi



IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA SOSIAL KONFLIK ANTAR ETNIS DI NTB

Ramli Akhmad^{1*}, Enok Maryani²

¹Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Selong, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Email Koresponden: ramli.ak@hamzanwadi.ac.id

Diterima: 22-02-2020, Revisi: 14-06-2020, Disetujui: 24-06-2020

©2020 Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi

Abstrak Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dihuni oleh tiga etnis utama yaitu suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Beberapa permasalahan memicu konflik antar etnis di Nusa Tenggara Barat sehingga menyebabkan timbulnya kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui akar permasalahan terjadinya konflik antar etnis di Nusa Tenggara Barat; 2) mengetahui cara menyikapi bencana sosial konflik antar etnis; 3) merumuskan konsep nilai-nilai pancasila sebagai dasar pembelajaran mitigasi bencana sosial konflik antar etnis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan historiografi. Data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis terutama yang berkaitan dengan kejadian konflik antar etnis di NTB pada masa lampau. Hasil penelitian menunjukkan: 1) latar belakang konflik antar etnis di NTB didominasi oleh kurangnya komunikasi, adanya kepentingan, keterlibatan emosi, dan lemahnya kontrol diri sehingga masyarakat mudah terprovokasi; 2) bencana sosial konflik antar etnis dapat disikapi atau diantisipasi dengan pembelajaran di sekolah, terutama menggunakan media video, sehingga diketahui bagaimana konflik antar etnis itu terjadi, apa saja kerugian yang ditimbulkan, menyimpulkan dan memberikan saran positif dalam mengatasi konflik antar etnis melalui diskusi kelompok; 3) konsep nilai-nilai pancasila yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran untuk meminimalisasi konflik antar etnis antara lain meyakini keesaan Tuhan sang pencipta lingkungan dan alam semesta beserta isinya, saling menjaga ketertiban, menghargai pendapat orang lain, saling tolong menolong bila terjadi konflik dan tidak merusak lingkungan serta fasilitas umum lainnya.

Kata kunci: konflik antar etnis, nilai-nilai pancasila, mitigasi bencana sosial

Abstract West Nusa Tenggara is a province inhabited by three main ethnic groups namely the Sasak, Samawa, and Mbojo tribes. Several problems triggered inter-ethnic conflict in West Nusa Tenggara, causing losses. This study aims to: 1) find out the root causes of inter-ethnic conflict in West Nusa Tenggara; 2) knowing how to respond to social disasters between ethnic conflicts; 3) formulating the concept of the values of Pancasila as a basis for learning disaster mitigation between ethnic conflicts. This research uses descriptive method with historiographic approach. Data are systematically collected and analyzed, especially those related to inter-ethnic conflict in NTB in the past. The results of the research show: 1) the background of inter-ethnic conflict in NTB is dominated by lack of communication, interests, emotional involvement, and weak self-control so that people are easily provoked; 2) social disasters between ethnic conflicts can be addressed or anticipated by learning in schools, especially using video media, so that it is known how inter-ethnic conflict occurs, what are the losses incurred, conclude and provide positive advice in overcoming ethnic conflict through group discussions; 3) the concept of Pancasila values that can be implemented in learning to minimize conflicts between ethnic groups, among others, believe in the unity of God, the creator of the environment and the universe and their contents, maintaining order, respecting the opinions of others, helping one another when conflicts occur and not damaging the environment and other public facilities.

Keywords: interethnic conflict, pancasila values, social disaster mitigation

PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu hal yang sering dialami oleh individu dan kelompok. Dalam perkembangan sejarah, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak pernah terpisahkan. Selama ini kebanyakan orang memandang konflik dalam dua hal, pertama sebagai hal yang natural, normal, dibutuhkan, dan tak dapat dielakkan. Kedua, konflik dipandang sebagai suatu permasalahan

yang harus diatasi. Namun selama ini *image* terhadap konflik terkesan negative. Artinya konflik selalu diidentikkan dengan permasalahan, kekerasan, tidak menyenangkan, penderitaan, dan perang (Agung, 2011). Indonesia terkenal dengan keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, dengan keberagaman itu tak jarang menimbulkan konflik antar kelompok (suku dan agama). Kita masih ingat ketika bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Setahun pasca kejadian itu, terjadi konflik antar kelompok masyarakat dengan menggunakan identitas agama dan etnis di berbagai daerah di Indonesia seperti Maluku, Poso, dan termasuk di Nusa Tenggara Barat. Konflik itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja melainkan menimbulkan luka psikologis yang sangat dalam bagi para korban konflik tersebut.

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan deretan ratusan pulau-pulau kecil lainnya. Dari 279 pulau yang ada, terdapat 44 pulau yang telah berpenghuni. Provinsi dengan luas wilayah mencapai 20.153,20 km² ini terakumulasi dari Luas Pulau Sumbawa yang mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja (BPS, 2017). Dengan letak geografis yang luas, NTB memiliki etnis, agama, ras, bahasa yang berbeda. Selain letak geografis, keberagaman ini pula diakibatkan karena dipengaruhi budaya luar, baik yang berasal dari penduduk yang pindah domisili dari luar daerah maupun masyarakat pendatang sebagai wisatawan yang berasal dari luar negeri. Tidak semua masyarakat di NTB merupakan asli pribumi, namun sebagiannya merupakan masyarakat pendatang, dari pulau dan daerah-daerah terdekat, seperti daerah Kupang, Flores, Papua, Bali, bahkan masyarakat dari beberapa daerah se-Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa bahkan ada pula wisatawan mancanegara yang datang dan tinggal di provinsi NTB. Keberagaman masyarakat inilah yang kemudian menjadikan masyarakat di NTB tidak memiliki persepsi dan ideologi yang sama. Ketidaksamaan ini kemudian diindikasikan sering menjadi pemicu bencana sosial berupa konflik yang menyangkut perbedaan Suku, Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

Salah satu contoh bencana sosial konflik antar etnis yang terjadi di NTB yaitu kasus kerusuhan antara etnis Bali dan Sumbawa pada tahun 2013. Konflik antar etnis berupa kerusuhan tersebut berawal dari adanya informasi meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan, sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang polisi dari etnis Bali (Sitompul, 2013). NTB memiliki beragam etnis, seperti istilah "SASAMBO" digunakan untuk menyingkat nama etnis utama di NTB yaitu etnis Sasak, Samawa dan Mbojo. Etnis Sasak merupakan etnis bagi masyarakat Lombok, Etnis Samawa adalah etnis masyarakat Sumbawa dan etnis Mbojo merupakan etnis yang dimiliki oleh masyarakat Bima (Iskandar, 2013).

Berbicara tentang etnis, khususnya di Indonesia yang dulu dikenal dengan Nusantara telah dihuni oleh ratusan kelompok etnis yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan termasuk kerap kali terjadi konflik sosial berdarah terutama sejak Indonesia merdeka. Bahkan beberapa sejarawan dan pengamat sosial humaniora menyebut bahwa konflik SARA di bangsa Melayu telah terjadi sebelum era pra kolonial. Konflik SARA menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius, dan multi kultur seperti Indonesia (Pramono & Munandar, 2020). Di awal masa kemerdekaan, konflik sosial berdarah di Indonesia lebih bersumber pada konflik politik dan ideologi. Kemudian di akhir abad ke-20 berganti wajah menjadi konflik identitas agama dan identitas etnis. Perbedaan agama atau etnis bukan lagi menjadi sumber kekuatan bangsa, namun saat ini telah menjadi sumber bencana. Rentetan konflik di Indonesia makin sering terjadi semenjak krisis moneter disertai krisis ekonomi dan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, hal ini membawa implikasi ganda baik bersifat positif maupun negatif bagi masa depan Indonesia (Sirajuddin, 2015). Euforia politik, ekonomi, dan hukum tahun 1998 telah memberikan kesempatan emas bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum ke arah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Namun, di balik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa (Sumardiana, 2016).

Dari hasil temuan di tengah masyarakat menunjukkan sampai sejauh ini masih sering terjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat ataupun antar etnis. Seperti kerusuhan antar kampung, dan antar kelompok masyarakat terutama saat prosesi adat *nyongkolan* (arak-arakan pengantin). Minimnya kesadaran dan semangat persatuan sering kali memicu terjadinya konflik sosial. Angka kriminalitas yang terus meningkat juga sering berujung pada perkelahian antar kelompok. Bahkan pada musim-musim kontestasi politik seperti pemilihan kepala desa, kepala daerah, calon legislatif, maupun pemilihan presiden tidak sedikit yang berakhir ricuh. Terlebih saat-saat ini masih mewabahnya virus Corona (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara, rentan terjadi konflik sosial bila tidak menaati aturan atau protokol yang berlaku di tengah masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi biasanya disebabkan bukan hanya atas dasar kepentingan atau kesalah pahaman, hal tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat bagaimana mengatasi dan meminimalisir terjadinya konflik sosial. Selain itu, terjadinya konflik di tengah masyarakat biasanya didasari pada lemahnya penanganan konflik, tidak hanya pada saat terjadi, tetapi juga lemahnya peran pemerintah sebelum terjadi, saat berlangsungnya konflik, dan setelah peristiwa itu terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akar permasalahan setiap konflik antar etnis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, untuk mengetahui cara menyikapi bencana sosial konflik antar etnis ini dengan baik dan bijak, serta diharapkan bisa memberikan pemahaman bagaimana mengimplementasikan konsep nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembelajaran mitigasi bencana sosial konflik antar etnis dalam studi kasus etnis suku Sasak, Samawa, Mbojo di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai bagian dari edukasi atau sosialisasi berupa pembelajaran masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian historiografi, yaitu suatu tahap untuk menyampaikan kesimpulan melalui penyusunan urutan secara kronologi (Asmara, 2016). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa penelitian historiografi merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan evaluasi data secara sistematis yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi akibat perbedaan (Irwanto & Sair, 2014). Penelitian ini menguji hubungan sebab akibat atau kecenderungan kejadian-kejadian yang dapat membantu menggambarkan dan merunut kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) menentukan permasalahan isu-isu yang pernah berkembang di masa lalu yang hingga kini masih sering terjadi; 2) mengungkapkan tujuan dilakukannya penelitian; 3) mengumpulkan data primer dan skunder; 4) evaluasi data; 5) sampai dengan melaporkan hasil penelitian dengan melakukan analisis data.

Pengumpulan data primer dari penelitian ini didapatkan dari sumber yang pernah mengalami dan menjadi saksi terjadinya konflik yang berkecamuk masa-masa tahun 90-an. Selanjutnya data skunder yang didapatkan berupa data informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya yang berhubungan langsung dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau mengenai konflik antar etnis. Data-data yang didapatkan berupa buku, artikel, berita dan catatan yang didapatkan dari wawancara sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Adapun tinjauan literatur dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup semua hasil komunikasi lisan maupun tertulis berupa video, foto dan hasil wawancara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kriminalitas Sebagai Pemicu Konflik

Untuk mempertahankan kondisi damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat selalu akan menjadi tantangan, apalagi dengan kondisi karakteristik masyarakat yang multi-etnis. Dalam teori fungsionalisme, pada setiap individu ditekankan untuk memainkan peran mereka secara efektif dalam lingkungan masyarakat. Sehingga upaya perdamaian dan harmonisasi di tengah perbedaan itu harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu penguatan tanggung jawab pada diri setiap anggota masyarakat harus terus dipupuk, salah satunya melalui sistem pendidikan. Sebagai contoh misalnya di satu sekolah terdiri dari siswa dengan latar belakang yang beraneka ragam. Maka

sebagai konsekwensi logisnya harus difasilitasi dengan guru yang mampu mengakomodir variasi atau keanekaragaman budaya, bahasa, agama, etnis dan berbagai perbedaan tersebut. Untuk memenuhi tantangan ini, guru semestinya diharapkan dapat melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan keadaan itu. Sebab, dengan tidak adanya kesadaran dan kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila, sangat mungkin dapat memicu terjadinya konflik antar etnis (Hashim et al., 2015). Kemiskinan dan faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor pemicu timbulnya kriminalitas dan konflik di tengah masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan beragam etnis, agama, ras dan antar golongan. Data mengenai tingkat kriminalitas di NTB dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perkembangan Kriminalitas Menurut Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Motif Kasus	Jumlah kejahatan yang dilaporkan		
		2016	2017	2018
1	Pembunuhan	35	21	18
2	Penganiayaan Berat (Anirat)	70	37	19
3	Penganiayaan Ringan (Anira)	115	256	603
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	401	313	303
5	Perkosaan	50	44	46
6	Penculikan	11	2	2
7	Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	390	310	204
8	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	597	526	394
9	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	1.978	1.397	1.021
10	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	975	488	529
11	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	228	325	174
12	Pembakaran Dengan Sengaja	26	4	4
13	Narkotika dan Psikotropika	210	155	188
14	Penggelapan	339	318	329
15	Korupsi	2	15	11
16	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	3	0

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan Nusa Tenggara Barat, 2018.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa tingkat kriminalitas di Nusa Tenggara Barat khususnya pencurian kendaraan bermotor menempati posisi tertinggi, meski mengalami sedikit penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan angka kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) mencapai 1.978 pada tahun 2016, sedikit menurun pada tahun 2017 mencapai 1.397 dan turun kembali menjadi 1.021 pada tahun 2018. Data tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan, belum lagi kasus-kasus kejahatan di masyarakat yang banyak pula tidak dilaporkan. Terutama kasus curanmor sering kali menyebabkan emosi masing-masing golongan masyarakat geram dan menyebabkan terjadinya konflik antara pelaku dengan pihak korban. Tidak hanya kasus kejahatan curanmor, kasus-kasus seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan jenis kejahatan lainnya juga sangat berpotensi menyebabkan konflik sosial yang lebih besar, termasuk konflik antar etnis.

Faktor Sosial Budaya Sebagai Pemicu Konflik

Heterogenitas masyarakat NTB berkonsekwensi dapat memicu semakin tingginya potensi terjadinya konflik. Tidak mengherankan, jika NTB termasuk lima besar kawasan yang rawan konflik. Intensnya konflik di kawasan ini dapat ditunjukkan, misalnya meskipun begitu represifnya pemerintahan orde baru dalam meredam konflik melalui reduksi SARA, namun di daerah ini masih juga muncul riak-riak konflik internal yang berbau SARA. Seperti kasus kerusuhan di Kabupaten Bima yang terjadi antar umat Islam dan Kristiani tahun 1970-an, kasus antaretnis Samawa dengan Bali pada 17-19 Agustus 1980, kasus perselisihan historis antara etnis Samawa yang berada di kampung Taliwang, Cakranegara dengan etnis Bali yang ada di perkampungan sekitarnya (peristiwa yang lebih mutakhir terjadi 4 April 2000) dan yang lebih hangat dan banyak dibicarakan adalah Tragedi Mataram atau yang

dikenal dengan Tragedi Satu Tujuh Satu, yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani pada tanggal 17 Januari 2000. Apabila contoh kasus yang ditampilkan di atas lebih memperlihatkan kondisi konflik antara penduduk asli yang mayoritas dengan pendatang, namun peluang konflik itu juga dapat terjadi antar penduduk asli yang jumlah penduduknya lebih besar atau antar sub-sub etnis yang terdapat dalam satu etnis (konflik intraetnis). Identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat yang multietnik senantiasa tergantung pada situasi dan konteks di mana seseorang berada (Marzuki, 2010).

Faktor lain yang juga dapat memicu konflik antar kelompok atau antar etnis adalah kegiatan-kegiatan sosial budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktifitas-aktifitas di luar batas atau di luar dari tradisi yang sebenarnya. Seperti adat *nyongkolan* dalam suku sasak. Budaya *nyongkolan* ini merupakan rangkaian budaya pernikahan suku sasak. Secara teknis adat *nyongkolan* dilaksanakan dengan membuat arak-arakan di jalan raya mengiringi pengantin. Biasanya dilengkapi dengan music tradisional gendang beleq, namun ada pula yang menggunakan instrument kecimol, semacam dangdut gerobak atau dangdut keliling. Hingar binger music pengiring sering kali menyebabkan kalangan pemuda berjoget bersama dan tak jarang diikuti oleh kebiasaan minum minuman beralkohol sehingga dalam keadaan mabuk sangat berpotensi menyebabkan konflik, baik antar pemuda maupun masyarakat pada umumnya. Seperti kasus *nyongkolan* yang berujung ricuh pada agustus 2014 di Desa Batukliang Utara, Lombok Tengah.



Gambar 1. Kerusuhan antar kampung di Batukeliang Utara Lombok Tengah
(Sumber : Baihaki, 2014)

Kasus-kasus konflik yang berkepanjangan membuat pihak-pihak terkait harus membentuk tim-tim kajian untuk mengkaji persoalan yang terjadi. Seperti pembentukan Tim Pengkajian dan Pengembangan Sumbawa pada bulan Maret 2000. Pembentukan tim tersebut mengarah pada upaya menemukan solusi atas keinginan dua etnis yang berbeda yakni etnis Sasak dan Samawa. Dua etnis asli dan berpenduduk dalam jumlah jumlah besar yang ada di pulau Sumbawa hendak memisahkan diri dari etnis Sasak di Pulau Lombok. Mereka ingin membentuk provinsi tersendiri yakni provinsi Sumbawa. Selain itu, keengganan sebagian besar sesepuh etnis Samawa untuk bergabung dengan etnis Mbojo dalam membentuk provinsi bersama juga dapat menjadi tanda-tanda adanya potensi konflik. Selain potensi-potensi konflik antaretnis, juga di kawasan ini sangat potensial terjadi konflik intraetnis, misalnya konflik historis yang bersifat laten antara etnis Sasak yang berada di Petemon dan Karang Genteng, Lombok Barat serta fenomena menjamurnya kelompok keamanan, sejenis Banser, Pam Swakarsanya NU dan lainnya pascatragedi Satu Tujuh Satu, di pulau Lombok, yang sampai Maret 2000, telah berdiri tidak kurang dari belasan buah kelompok keamanan. Upaya membentuk Pam Swakarsa, tidak hanya sampai pada etnis Sasak, tetapi etnis Bali yang demi keamanannya lalu membentuk Pam Swakarsa sendiri, yang diberi nama Dharmawisesa, begitu pula etnis Samawa membentuk Pam Swakarsa, yang diberi nama Kebo Karong

Faktor Bahasa Terhadap Kerentanan Konflik Antar-Etnis di NTB

Dari analisis sepintas atas data kebahasaan bahasa Sasak, diperoleh gambaran bahwa secara kebahasaan di antara desa-desa yang menjadi sampel penelitian tidak ada satu desa pun yang tidak dipisahkan oleh garis isoglos (garis perbedaan unsur bahasa). Artinya, setiap desa memiliki ciri kebahasaan yang membedakannya dengan ciri kebahasaan di desa lainnya. Suatu pola sebaran bahasa yang sangat rumit, dibandingkan dengan pola dialektal bahasa-bahasa Austronesia Barat lainnya, misalnya bahasa Sumbawa, Bahasa Bali, bahasa Jawa dan lain-lain. Itu artinya pula, bahwa jika salah satu fungsi hakiki bahasa adalah alat penanda komunitas, maka dapat dikatakan bahwa etnis ini tersegmentasi dalam berbagai subetnis dengan penanda kebahasaan yang berbeda-beda (Budasi, 2015).

Dari segi kebahasaan pula diperlihatkan bahwa etnis ini tidak memiliki satu varian (dialek) tertentu yang dapat menjadi semacam lingua franca, seperti dalam bahasa Sumbawa, misalnya, dialek Sumbawa Besar, yaitu dialek yang digunakan di pusat kesultanan Sumbawa yang dikenal dan dikuasai oleh penutur dialek lainnya: dialek Jereweh, Taliwang, maupun dialek Tongo; atau bahasa Jawa dialek Solo-Yogya dikenal dan digunakan oleh penutur dialek bahasa Jawa lainnya, yang terimplikasi dalam kosakata bahasa Halus (Paridi et al., 2018). Adanya dialek yang menjadi kerangka acuan berbahasa baik dalam bahasa Sumbawa maupun dalam bahasa Jawa yang dicontohkan di atas sebenarnya berterima dengan kenyataan historis tentang adanya sebuah pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap beberapa kerajaan kecil di bawahnya. Kesultanan Sumbawa misalnya, menurut sejarah (Mantja, 1984), merupakan pusat pemerintahan yang membawahkan tiga datu, yaitu datu Jereweh, Taliwang, dan Seran. Begitu pula dengan berterimanya dialek Solo-Yogya sebagai lingua franca (sebagai bahasa standar) tidak lepas dari besarnya pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram tempo dulu. Kondisi tentang etnis Sasak yang digambarkan secara linguisitis di atas, menunjukkan bahwa etnis ini terpolarisasi dalam berbagai subetnis, yang tak satupun subetnis yang mendominasi yang lainnya, kecuali etnis Karang Asem (Bali) yang memang datang untuk menguasainya.

Tiap-tiap subsegmen (subetnis) memiliki ciri-ciri tersendiri sebagai komunitas yang memiliki eksistensi masing-masing, yang ditandai dengan adanya varian tertentu yang mereka gunakan, yang berbeda satu sama lain, meskipun masih dalam lingkup satu bahasa. Tersegmentasinya etnis ini ke dalam subsegmen, di mana desa sebagai basis kekuatannya, juga ditunjukkan pada masa kolonisasi dulu telah terjadi migrasi penduduk etnis Sasak secara internal, di mana suatu daerah tutur varian bahasa Sasak tertentu dipindahkan dan atau berpindah ke daerah tutur varian bahasa Sasak lainnya, sehingga membentuk daerah pemukiman penutur yang baru. Antarpenutur daerah pemukiman yang baru dengan penutur daerah pemukiman yang ada sebelumnya tidak terjadi kontak satu sama lain, sehingga pada klimaks terbentuklah perkampungan (desa) etnis Sasak yang bersifat tertutup, yang pada gilirannya menjadi benih yang potensial bagi munculnya konflik internal antarsesama mereka. Hal ini sengaja dilakukan dalam rangka kepentingan kolonial agar tetap menjadi kekuatan dominan yang mendominasi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di pulau Lombok.

Cukup menarik apa yang dikemukakan di atas, bahwa ternyata dari hasil studi awal yang dilakukan dari aspek kebahasaan, menunjukkan bahwa subetnis Sasak, yang tinggal di Petemon dan Karang Genteng yang sejak dahulu berkonflik tersebut memang menggunakan varian bahasa Sasak yang berbeda. Termasuk konflik yang terjadi pada kegiatan budaya atau adat, seringkali terjadi konflik lebih dipengaruhi pada kurangnya pemahaman bahasa dalam komunikasi antar kelompok yang satu dengan yang lain, terlebih aktifitas-aktifitas masyarakat dalam kegiatan budaya tersebut menunjukkan adanya sikap-sikap diluar batas. Konflik antar kelompok yang terjadi di Indonesia, dalam catatan sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo merupakan satu dari banyak persoalan yang dihadapi oleh negara kita. Masalah keamanan, sosial, ekonomi, politik dan moral. Pelajaran yang bisa kita peroleh dari pertikaian antarkelompok tersebut adalah bahwa sifat dan kedalaman konflik yang terjadi sudah mengarah pada upaya untuk menghilangkan satu kelompok kultural oleh kelompok kultural yang lain. Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai sudah tidak lagi memberi penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ironis, ketika kita dalam banyak kesempatan sering membanggakan diri sebagai bangsa yang santun, ramah dan beradab, namun dalam realitasnya kita justru melakukan tindakan yang menafikan dan jauh dari nilai-nilai tersebut (Raharjo, 2010).

Keberagaman dan Konflik Antar Etnis di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) kaya akan paduan kelompok-kelompok etnis. Diantara etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo. Selain etnis asli pribumi, di NTB juga terdapat etnis Bugis, Banjar, Jawa, Sunda, Bali dan pendatang dari etnis Sumatera. Sedangkan dari luar negeri terdapat etnis Arab, Cina dan India. Sejarah kontak antaretnis di Lombok dibuktikan dengan adanya beberapa kampung yang dinamai dengan kelompok etnis yang tinggal, seperti Kampung Arab, Kampung Bugis dan Kampung Banjar. Kedatangan etnis dari luar ke NTB melalui jalur perdagangan, perkawinan dan hubungan interpersonal. Etnis Arab misalnya, adalah para kafilah pedagang dari Yaman utara yang datang ke Lombok sekitar satu abad yang lalu dan mempertahankan pemisahan identitas etnis mereka melalui ideologi endogami yang secara khusus diperkuat kembali melalui ikatan perkawinan. Ideologi endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misalnya lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial atau lingkungan pemukiman (Akhmad, 2020).

1) Etnis Sasak Pulau Lombok

Sebelum agama Islam masuk di Pulau Lombok, masyarakat khususnya Etnis Sasak masih menganut berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme dan Hindu. Menurut Ahmad Abd. Diperkirakan masuknya Hindu ke Pulau Lombok karena hadirnya Majapahit. Awalnya, Islam masuk ke wilayah Lombok pertama kali melalui para wali dari pulau Jawa, yakni Sunan Prapen sekitar abad 16 M. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat Kerajaan Lombok dipimpin oleh Prabu Rangkesari (Pangeran Prapen), putra Sunan Ratu Giri datang mengislamkan kerajaan Lombok. Pengislaman tersebut merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Ratu Giri dari Gresik yang memerintahkan raja-raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara (Muslimah, 2017). Kemudian pada akhir abad 16 banyak para pendatang dari Pulau Jawa yang bermigrasi ke Pulau Lombok sambil menyebarkan agama Islam oleh Sunan Prapen putra Sunan Giri yang berkuasa di Giri Jawa Timur pada waktu itu, sehingga agama masyarakat Sasak berubah yang sebelumnya beragama Hindu menjadi agama Islam. Sampai saat ini penduduk Pulau Lombok khususnya Etnis Sasak memeluk agama Islam. Sebagian pemeluk agama Hindu pada masyarakat Sasak adalah para penduduk keturunan Bali. Selain itu juga terdapat agama lain seperti Kristen dan Budha yang dipeluk oleh masyarakat dari berbagai etnis dan etnis yang bermukim dipulau ini.

Pulau Lombok sebagian besarnya memiliki tanah yang subur dan pantai yang indah, bahkan pantainya adalah yang terindah kedua setelah Bali. Kelebihan inilah yang diduga menjadi magnetnya Pulau Lombok, sehingga dari dulu sampai sekarang banyak etnis-etnis luar datang dan menetap di pulau kecil ini. Tercatat kurang lebih sepuluh etnis nonpribumi yang telah lama menetap di pulau ini, yaitu Bali, Jawa, Mandar, Bugis, Arab, Melayu, Tionghoa, Bajo, Bima, dan Sumbawa. Kedatangan kelompok-kelompok ini tidak selamanya diterima baik oleh penduduk lokal, terutama etnis Bali yang datang sebagai penjajah. Benturan budaya dan kepentingan memudahkan konflik horizontal, dan keadaan ini yang dimanfaatkan oleh bali untuk melakukan politik adu dombanya. Namun demikian, sesungguhnya jauh sebelum Bali berkuasa, antar kerajaan-kerajaan di Lombok juga sering terjadi konflik atau peperangan, karena tidak adanya kerajaan besar yang dapat secara absolut menguasai dan menyatukan wilayah Lombok secara keseluruhan. Kedatangan Karang Asem, Bali bukannya dapat meredam konflik antara kerajaan-kerajaan Sasak. Sebaliknya, konflik antar kelompok Sasak semakin signifikan dan ini memang sengaja didesain agar konsolidasi antar kelompok Sasak tidak terjadi (Wildani, 2014).

2) Etnis Samawa di Sumbawa

Etnis Sumbawa atau Samawa adalah etnis bangsa yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah pulau Sumbawa (meliputi kabupaten Sumbawa dan Sumbawa barat), Nusa Tenggara Barat. Populasi etnis Sumbawa adalah sekitar 500.000 orang. Etnis Sumbawa tersebar di dua kabupaten, yaitu kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi kecamatan Empang di ujung timur hingga kecamatan Taliwang dan Sekongkang yang berada di ujung barat dan selatan pulau, termasuk 38 pulau kecil di sekitarnya. Etnis Sumbawa sendiri, selama beberapa abad ini mengalami percampuran dengan etnis pendatang, seperti etnis dari Jawa, Sumatra, Sulawesi,

kalimantan dan cina serta arab. Etnis Sumbawa yang telah bercampur dengan etnis lain ini, biasanya bermukim di dataran rendah dan daerah-daerah pesisir. Sedangkan etnis Sumbawa yang masih asli menempati dataran tinggi pegunungan seperti Tepal, Dodo dan Labangkar.

Salah satu kasus bentrok pernah terjadi antara etnis Bali dan etnis Samawa. Sebagaimana dikutip dalam berita liputan 6, (22/1/2013) di kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rumah dan mobil milik etnis Bali dibakar warga Sumbawa. Hingga kerusuhan yang terjadi di dalam kota Sumbawa Besar, di sekitar Jalan Tambora dan Jalan Baru, Kabupaten Sumbawa, berlangsung lama. Ribuan warga etnis Samawa atau Sumbawa melakukan *sweeping* terhadap rumah-rumah dan mobil-mobil etnis Bali yang berada di sepanjang jalan kota Sumbawa Besar. Kerusuhan itu berawal dari adanya informasi meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan, sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang anggota polisi dari etnis Bali (Hatta, 2013). Akibatnya, aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa Besar tak bisa terelakkan. Namun karena jawaban dari pihak kepolisian tetap sama, warga akhirnya melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran di sepanjang Jalan Baru dan Jalan Tambora yang letaknya tak jauh dari Mapolres Sumbawa Besar.



Gambar 2. Suasana saat konflik antar etnis di Sumbawa tahun 2013
(Sumber: Sumitre, 2013)

3) Etnis Mbojo di Kabupaten dan Kota Bima

Etnis Bima merupakan etnis yang mendiami Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Etnis ini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pemukiman orang Bima biasa disebut kampo atau Kampe yang dikepalai orang seorang pemimpin yang disebut dengan Ncuhi. Jumlah Ncuhi yang terdapat di Etnis Bima adalah tujuh Ncuhi yang pemimpin di setiap daerah. Ncuhi dibantu oleh golongan kerabat yang tua dan dihormati. Kepemimpinan diwariskan turun temurun di antara keturunan nenek moyang pendiri desa. Setiap daerah menamakan dirinya sebagai bagian dari Bima, meski pada kenyataannya tidak ada pemimpin tunggal yang menguasai pemerintahan tanah Bima. Berbagai versi menyebutkan asal mula kata Bima menjadi etnis tersebut. Ada yang mengatakan, Bima berasal dari kata “Bismillaahirrohmaanirrohiim”. Hal ini karena mayoritas etnis Bima beragama Islam. Menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama etnis tersebut, yakni Sang Bima. Saat ini, mayoritas etnis Bima menganut agama Islam yang kini mencapai 95% lebih, di samping sebagian kecil juga menganut agama Kristen dan Hindu. Tetapi, ada satu kepercayaan yang masih dianut oleh etnis Bima yang disebut dengan *Pare No Bongi*, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. *Pare No Bongi* merupakan kepercayaan asli orang Bima. Dunia roh yang ditakuti adalah Batara Gangga sebagai dewa yang memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai penguasa (Pembka Bima, 2015).

Salah satu konflik yang pernah terjadi di Bima seperti yang dikutip pada tempo.com, yakni, perang antarwarga tahun 2015. Aksi saling serang kedua kelompok warga tidak terhindarkan. Petugas

kepolisian yang disiagakan di lokasi kejadian tidak mampu memisahkan kedua kelompok. Bahkan sejumlah polisi menjadi sasaran aksi massa yang brutal. Bentrokan itu dipicu salah paham antarwarga desa. Bentrokan terjadi akibat penganiayaan warga Sie, sehari sebelumnya. Warga Sie yang tidak terima dengan peristiwa bentrok pertama rencananya melakukan penyerangan pada Sabtu, 21 November 2015. Warga di dua dusun itu sudah menyiapkan berbagai senjata tajam seperti senjata api rakitan, tombak, pedang, parang, dan bambu runcing. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bima Ajun Komisariss Besar Gatut Kurniadin menyatakan, suasana sudah bisa dikendalikan. Akibatnya dua orang warga meninggal (Akhyar, 2015).

Pembelajaran Masyarakat Untuk Menyikapi Konflik Antar Etnis

Pembelajaran masyarakat diartikan suatu tindakan atau aksi berupa edukasi yang memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat dalam rangka memberikan kesadaran menuju ke arah yang lebih baik dan positif. Media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran masyarakat dalam mengatasi konflik sosial khususnya konflik antar etnis adalah dengan menggunakan video, foto dokumenter, slide presentasi dan recorder. Dengan media video, guru bisa mempertontonkan bagaimana konflik antar etnis itu terjadi, apa saja kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut, menyimpulkan dan memberikan saran positif dalam mengatasi konflik antar etnik tersebut dalam kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, selama pemutaran video dan pembelajaran berlangsung guru berperan aktif memberikan pencerahan, penguatan serta menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga ketertiban, saling menghargai, dan saling menghormati antar etnis dengan menggalakkan kegiatan kerja bakti di lingkungan yang berpotensi konflik. Kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan melalui program-program pengurangan risiko bencana untuk mengatasi kerentanan konflik dengan berbasis pada komunitas secara kontinyu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Maarif, 2011).

Penanaman nilai-nilai Pancasila

1) Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Keyakinan terhadap Tuhan yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yakni maha kasih, maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Contoh sikap positif terhadap pancasila pada sila pertama seperti: a. Meyakini akan keesaan Tuhan sang pencipta lingkungan dan alam semesta beserta isinya; b. Meyakini akan adanya azab Allah yang pedih bila kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia; c. Sama-sama menjaga dan memelihara alam dengan baik sebagai tempat tinggal bersama; d. Senantiasa berdoa agar selalu terjaga dan terlindung dari segala bencana, termasuk bencana sosial berupa konflik antar etnis.

2) Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Pada sila kedua terkandung nilai kemanusiaan pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Pengakuan manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas perbedaan antara manusia dengan hewan. Contoh sikap positif terhadap pancasila pada sila kedua seperti: a. Saling tolong menolong bila terjadi bencana; b. Saling menghargai antar etnis; c. memperlakukan dan melibatkan semua kalangan dengan adil dalam segala kegiatan; d. Sama-sama saling mensupport dalam menjalani kehidupan pada lingkungan yang multikultur

3) Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan etnis-etnis bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Pengakuan terhadap kebinekaan etnis bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Contoh sikap positif yang berwawasan lingkungan terhadap pancasila pada sila ketiga seperti; a. Saling menjaga ketertiban; b. Melihat kesamaan daripada mempertajam perbedaan antar etnis; c. Menyelesaikan masalah bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan; d. Mengikuti kegiatan bakti sosial atau gotong royong untuk kepentingan bersama.

- 4) Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Sila keempat terkandung nilai kerakyatan Kedaulatan Negara adalah di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia adalah warga Negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Contoh sikap positif terhadap pancasila pada sila keempat seperti; 1) Menghargai pendapat orang lain, 2). Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3). Jika ada masalah dalam kelompok belajar kita selesaikan dengan berunding atau bermusyawarah. 4). Ikut dalam PEMILU jika sudah cukup umur baik tingkat Nasional maupun Lokal, 5) Tidak marah atau sakit hati jika pendapat kita ditolak.

- 5) Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila kelima terkandung nilai keadilan sosial dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, materi dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Contoh sikap positif terhadap pancasila pada sila kelima seperti; 1) Memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. 2) Membayar pajak tanpa membedakan kaya atau miskin. 3). Tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum. 4) Tidak bertindak korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 5) Gaya hidup hemat dan bersih misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan lampu jika tidak digunakan lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik antar-etnis di NTB lebih didominasi oleh kurangnya komunikasi sehingga masyarakat mudah terprofokasi oleh isu-isu yang di dalamnya terdapat unsur SARA; Adanya kepentingan dan keterlibatan emosi, sehingga masyarakat sering tidak dapat mengontrol diri. Selain itu, faktor kriminalitas, budaya dan bahasa juga menjadi pemicu sering terjadinya konflik antar etnis. Akibatnya, korban jiwa berjatuh, kerusakan dan kehilangan harta benda, bahkan keberlangsung hidup anak cucu menjadi terganggu; 2) Untuk menyikapi berbagai konflik antar etnis ini dapat dilakukan dengan memberlakukan pembelajaran masyarakat, terutama dengan pembelajaran berbantuan media video. Melalui media tersebut guru dapat mempertontonkan bagaimana konflik antar etnis itu terjadi, apa saja kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut, menyimpulkan dan memberikan saran positif dalam mengatasi konflik antar etnik tersebut dalam kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, selama pemutaran video dan pembelajaran berlangsung guru berperan aktif memberikan pencerahan, penguatan serta menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga ketertiban, saling menghargai, dan saling menghormati antar etnis dengan menggalakkan kegiatan kerja bakti di lingkungan yang berpotensi konflik; 3) Dalam proses pembelajaran dapat pula dilakukan internalisasi konsep nilai-nilai kebinekaan yang terkandung pada pancasila. Hal itu dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran mitigasi bencana sosial konflik antar etnis dalam studi kasus etnis Sasak, Samawa, Mbojo di Nusa Tenggara Barat. Implementasi nilai yang terkandung dalam pancasila ini berupa, Meyakini akan keesaan Tuhan sang pencipta lingkungan dan alam semesta beserta isinya, saling tolong menolong bila terjadi konflik, saling menjaga ketertiban, menghargai pendapat orang lain, dan tidak merusak lingkungan serta fasilitas umum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. (2011). Konflik antar kelompok: perspektif psikologi sosial (*Conflict intergroup: Social psychological perspective*). Available at SSRN 2552360.
- Akhmad, R. (2020). *Bahan ajar pendidikan sosial budaya; kajian geografi sosial budaya Pulau Lombok*. Selong: Universitas Hamzanwadi Press.

- Akhyar, M. N. (2015). *Bentrok antarwarga di Bima, dua tewas*. Diakses tanggal 09 Juni 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/721046/bentrok-antarwarga-di-bima-dua-tewas/full&view=ok>
- Badan Pusat Statistik NTB. (2017). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2017*. Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik NTB. (2018). *Statistika Kriminalitas Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018*. Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- Budasi, I. G. (2015). *Pembeda fonologis dan leksikal antara bahasa Sawu di NTT dan bahasa Bima di NTB*. In the 7th International Seminar on Austronesian-non Austronesian Languages and Literature.
- Hashim, A. T., Bakar, I. A., Osman, R., Mamat, N., & Razali, A. R. (2015). Strengthening relationship among multi-ethnic students in Malaysia. *Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education (JRPPTE)*, 5(1), 17-29.
- Hatta, R.T. (2013). *Bentrok antar etnis terjadi di Sumbawa*. Diakses tanggal 15 Februari 2020, dari <http://news.liputan6.com/read/494122/bentrok-antar-etnis-terjadi-di-sumbawa>.
- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan historiografi sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher.
- Iskandar, S. (2013). Inter-ethnic conflict Samawa and Bali in Sumbawa, Indonesia. *International Institute for Science, Technology and Education*, 3(20), 40-44.
- Maarif, S. (2011). Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi risiko bencana kekeringan. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 13(2), 65-73.
- Mantja, L. (1984). *Sumbawa pada masa dulu: suatu tinjauan sejarah*. Rinta.
- Marzuki, M. (2010). Perspektif etnik situasional dalam komunikasi politik anggota DPRD pada wilayah multi etnik. *Academica*, 2(2), 402-412.
- Muslimah, F. (2017). *Mengenal islam di Lombok lewat kampung muslim wetu telu*. Diakses tanggal 10 Juni 2020, dari <https://www.gomuslim.co.id/read/destinasi/2017/01/01/2761/mengenal-islam-di-lombok-lewat-kampung-muslim-wetu-telu.html>
- Paridi, K., Sudika, I. N., & Burhanuddin, B. (2018). Penyuluhan standarisasi sistem fonologi bahasa Sumbawa. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 223-224.
- Pemkab Bima (2015). *Sejarah Bima*. Diakses tanggal 12 Juni 2020 dari <https://pulausumbawanews.net/index.php/2015/06/26/sejarah-bima/>
- Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran undang-undang ormas terhadap penyelesaian konflik antar ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 52-62.
- Rahardjo, T. (2010). *Memahami kemajemukan masyarakat Indonesia (Perspektif komunikasi antarbudaya)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Asmara, N.S. (2016). Konflik ideologi buruh kereta api tahun 1949-1965. *Avatara, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 1215-1229.
- Sitompul, M. (2013). *Kerusuhan Sumbawa akibat tokoh agama tak didengar*. Diakses tanggal 17 Juni 2020 dari <https://inilah.com/news/1950430/kerusuhan-sumbawa-akibat-tokoh-agama-tak-didengar>
- Siradjuddin, S. (2015). Akar-akar konflik fundamental perspektif ekonomi politik. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(2), 17-39.
- Sumardiana, B. (2016). Formulasi kebijakan penanganan tindak pidana berbasis isu sara dalam pemilihan umum. *Pandecta: Research Law Journal*, 11(1), 80-95.
- Wildani, R. F. (2014). *Suku Sasak yang tak mau diinjak*. Diakses tanggal 11 Juni 2020, dari <https://rfwildaniweb.wordpress.com/2014/06/20/suku-sasak-yang-tak-mau-diinjak/>

- Baihaki, M. (2014). Nyongkolan berakhir tawuran di Lombok Tengah, NTB. Diakses tanggal 11 Juni 2020 dari <https://www.youtube.com/watch?v=u6wST9cfAGk>
- Sumitre, M. (2013). *Kerusuhan Sumbawa: selain perusakan, massa juga melakukan penjarahan*. Diakses tanggal 11 Juni 2020 dari <https://sumitremade.wordpress.com/2013/01/22/kerusuhan-sumbawa-selain-perusakan-masa-juga-melakukan-penjarahan/#more-4214>